KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Pansus KPK hamburkan uang rakyat
Tanggal : Rabu, 04 Oktober 2017
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 3

Pansus KPK Hamburkan Uang Rakyat

JAKARTA-Meski kerja Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah diperpanjang. Namun KPK masih menolak untuk hadir di Pansus, sebelum ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas judicial review mengenai hak angket DPR.

Sikap KPK ini pun diapresiasi oleh Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang. Bahkan dirinya menilai keberadaan Pansus Angket KPK hanya sebagai pemborosan keuangan negara. "Jelas pemborosan uang rakyat. Apalagi sikap tegas KPK takkan hadir sebelum adanya putusan MK (Mahkamah Konstitusi) atas gugatan keabsahan Pansus KPK di MK," cetusnya saat dihubungi wartawan, Selasa (3/10).

Diketahui, alokasi anggaran Pansus KPK selama 60 hari kerja Rp 3,1 miliar dan diperpanjang pada waktu sama atau menjadi setara total Rp 6,2 miliar periode Juli-Desember 2017. Alokasi selama 60 hari kerja pertama (Juli-28 September 2017), menurut ketua Pansus KPK Agun Gunanjar Sudarsa, di antaranya terbesar untuk rapat-rapat Rp 582,5 juta, konsumsi rapat seperti makan Rp 29 juta, dan kudapan Rp 13 juta.

Apalagi, lanjut Sebastian, Pansus KPK hanya menargetkan kedatangan KPK. "Saya mendengar itu. Tapi kan menjadi tidak wajar jika pembiayaan dialokasikan sama tetapi hanya menunggu kehadiran KPK. Padahal, sekali lagi, KPK sudah tegas menolak hadir sampai ada hasil putusan gugatannya ke MK," selorohnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya sejumlah aktivis antikorupsi mendaftarkan permohonan judicial review atas hak angket DPR pada Pasal 79 ayat (3) dan Pasal 199 ayat (3) Undang-Undang MD3 ke MK. Dimana dalam gugatannya, aktivis menilai KPK selaku lembaga yudikatif tak bisa di angket oleh DPR.

Sementara, Wakil Ketua Pansus Angket KPK Eddy Kusuma Wijaya menegaskan, kalau pihaknya akan memanggil paksa lembaga antirasuah tersebut. "Sesuai dengan aturan kalau nanti sudah memenuhi syarat-syarat yang lain. Kita akan panggil lagi, kalau tidak datang yang dipanggil ketiga kali. Ini kan baru sekali. Kalau misalnya tidak datang juga kita akan lakukan upaya-upaya hukum sebagaimana UU MD3," kata Eddy, di Gedung DPR RI, Jakarta.

Anggota DPR RI Fraksi PDIP ini membeberkan, pihaknya akan menjadwalkan ulang pemanggilan KPK pada pekan ini. Maka itu, ia meminta semua pihak tidak mengaitkan kerja Pansus Angket dengan upaya pelemahan kerja KPK. "Kita bahas nanti. Jadwalnya supaya penggunaan waktu lebih efektif dan efisien supaya hasil yang kita harapkan betul-betul bisa memenuhi rekomendasi," kesal Eddy. Senada, Wakil Ketua Pansus Angket KPK Taufiqulhadi juga mengharapkan KPK bisa memenuhi panggilan Pansus. "Sampai kiamat pun akan kami tunggu (KPK). Nggak ada masalah," kata Taufiqulhadi.

Kendati demikian, anggota Komisi III DPR ini mengungkapkan, pihaknya menghormati permintaan KPK yang akan memenuhi undangan Pansus Hak Angket setelah menunggu putusan MK atas uji materi UU Nomor 17 Tahun 2017 (UU MD3) tentang soal hak angket DPR. "Kalau kita ambil kesimpulan sekarang tak adil, sepihak. Karena itu kami menunggu sampai KPK hadir. Kita tunggu sampai kiamat," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan, pihaknya tetap tidak akan menghadiri undangan Pansus Hak Angket KPK, hingga ada keputusan resmi dari MK soal status kelembagaan lembaga anti rasuah ini menurut Undang Undang. "Kami melihat ada perdebatan dua kubu pakar soal ini, jadi kami memohon sabar menunggu keputusan MK," kata Agus saat rapat dengar pendapat (RDP) di ruang Komisi III, di akhir September lalu.

Menurut Agus, keputusan MK ini sangat penting, sebagai tempat bergantung keputusan penilaian UU. Dan bila sudah ada keputusan resmi dari MK, maka KPK memutuskan akan hadir atau tidak atas undangan Pansus tersebut. (dil)



INFO GRAFIS: GIMBAL/INDOPOS